

Ditunda Tanpa Kepastian Kapan Dimulai Makan Bergizi Gratis Gagal Terlaksana di Balikpapan Menunggu Persiapan Badan Gizi Nasional

Program makan bergizi gratis (MBG) di Kaltim, khususnya di Balikpapan dan Samarinda kembali batal dimulai dari jadwal yang semula direncanakan.

BALIKPAPAN – Sebelumnya, setelah batal 6 Januari lalu MBG diundur menjadi 13 Januari, namun kenyataannya kemarin MBG belum bisa terlaksana. Ini karena beragam tahap persiapan yang harus dilalui Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara. "Tinggal finalisasi teknis dari catering dapur-dapur penyedia. Kabarnya mereka menunggu tempat penyajian," kata Asisten III Setdakot Balikpapan Andi Sri Juliarty kepada Kaltim Post. Sedangkan persiapan lain menurut informasi yang dia terima sudah siap. Pemilihan catering juga sesuai keputusan pusat, ada tiga catering lokal yang melayani program MBG. Sasaran pun masih terbatas pada daerah tertentu yakni Balikpapan Selatan.

Pemerintah pusat yang menetapkan sasaran sekolah seperti SD 010, SD 015, SD 016, SMP 18, SMP 26, dan SD Nurul Ilmi yang terdiri dua sekolah. "Total 3.335 anak yang menjadi penerima manfaat dari total 7 sekolah," tuturnya. Perempuan yang akrab disapa Dio ini menyampaikan pihaknya tinggal menunggu kesiapan catering saja sebagai penyedia makan siang gratis tersebut. Dia berharap bulan ini MBG bisa berjalan di Balikpapan.

"Beberapa hari ini catering menunggu kedatangan media penyajian," imbuhnya. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan ditugaskan untuk mengecek lokasi catering, lalu Disdikbud Balikpapan melakukan pendataan terhadap orangtua dan sekolah masing-masing. "Mana siswa yang memiliki alergi dan lainnya, jadi bisaantisipasi ganti opsi. Semua pihak berbagi tugas," ucapnya.

Dio menegaskan, rencana pelaksanaan MBG masih mengikuti arahan pemerintah pusat. Program prioritas Presiden Prabowo itu diserahkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang turun ke daerah sebagai penyelenggara MBG. Mereka menggandeng Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). "Pemkot Balikpapan siap mendukung, tapi sementara ini belum ada arahan dan informasi soal anggaran yang perlu diberikan pemerintah daerah," tuturnya.

Artinya semua kebutuhan dana masih berasal dari pemerintah pusat dalam tahap awal MBG. Dia menambahkan pelaksanaan awal masih menggunakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Di masa mendatang baru ada keterlibatan dana dari daerah. Namun Pemkot Balikpapan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan terlibat sesuai peran masing-masing.

"Dinas Kesehatan sedang melakukan peninjauan ke lokasi untuk melihat kelayakan catering, kebersihan sanitasi, higienitas semua harus memenuhi syarat," bebarnya. Nantinya, kata dia, terdapat perbedaan menu MBG siswa SD hingga SMA. Ini karena kebutuhan kalori dari sisi usia juga berbeda. Hal ini sudah dibahas kepada penyedia jasa. "Mereka menyatakan siap dan sanggup untuk mengatur itu, mereka sudah terlatih dan

tinggal pengawasannya," ucapnya. Terkait kapan MBG bisa terlaksana, pihaknya hanya menunggu kesiapan BGN.

Senada, Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik menyatakan dirinya belum mengetahui kapan teknis MBG bisa terlaksana secara pasti. "Belum ada informasi lagi dari BGN," sebutnya. Sementara hingga saat ini BGN juga belum bisa dimintai keterangan. Awak media ini sudah berusaha menghubungi perwakilan BGN dan *catering* namun tidak ada yang memberi respons.

Sebelumnya SMP 5 dan SMK 1 Balikpapan menjadi sasaran awal pelaksanaan program MBG. Kedua sekolah sempat dikunjungi BGN namun ternyata pelaksanaan MBG lepas dari rencana yang seharusnya mulai berjalan pada Senin (13/1). Kepala SMK 1 Balikpapan, Mujadi mengatakan pihaknya memang sempat berkoordinasi dengan BGN untuk pelaksanaan MBG. Kala itu, BGN menyebut akan melaksanakan MBG pada 6 Januari sesuai jadwal serentak se-Indonesia. Akhirnya ditunda menjadi 13 Januari untuk merampungkan segala persiapan. Pekan lalu petugas BGN kembali datang ke sekolah.

"Sekarang intinya ditunda sampai batas yang tidak ditentukan," katanya. Mujadi menambahkan, pihaknya juga belum mengetahui pasti SMK 1 akhirnya bisa atau tidak sebagai sasaran penerima. Sebab ada penetapan sekolah mana saja di Balikpapan Selatan yang menjadi lokasi pelaksanaan awal MBG. Pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut. "Kalau dari BGN mereka juga tidak menjelaskan atau cerita. Hal-hal lain kami tidak tahu," tuturnya. Sebelumnya dia juga sudah menyampaikan data kepada BGN terkait jumlah siswa SMK 1 yang berkisar 2.500 siswa. Namun ada siswa juga yang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) sekitar 400 orang selama tiga bulan.

"Jadi mungkin sisa 2.040 siswa yang ada di sekolah," jelasnya. SMK 1 tentu sudah melakukan persiapan dalam pelaksanaan MBG, misalnya mengatur ketua kelas yang mengambil di aula lalu dibawa kepada siswa lainnya di kelas. Sementara untuk media penyajian dan perlengkapan lain sudah dari *katering* sebagai penyedia. Dia bercerita hingga kini belum ada kabar terbaru dari BGN. "Kalau keputusan tetap di SMK 1 kami siap bekerja sama, tapi kalau tidak juga tidak masalah," ucapnya. Apalagi pihaknya memang belum memberitahu rencana ini kepada siswa. Mengingat belum ada keputusan atau informasi resmi soal MBG. "Setelah tertunda ini kami tidak ada pertemuan lagi dengan BGN. Jadi kami tunggu kabar untuk kepastiannya," tutupnya. (gel/riz)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Ditunda Tanpa Kepastian Kapan Dimulai Makan Bergizi Gratis Gagal Terlaksananya di Balikpapan, Menunggu Persiapan Badan Gizi Nasional, 14/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:

- a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.
2. Dalam Pasal 52 Perpres 83/2024 diatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan gizi nasional bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.